

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setelah terjadi Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 kehidupan bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan, salah satunya di bidang politik dimana selama 32 tahun di bawah kungkungan pemerintahan orde baru yang otoriter. Perubahan itu ditandai dengan diadakannya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2002. Adanya amandemen itu berimbas terhadap kebebasan berpolitik, antara lain dengan lahirnya partai-partai politik baru baik yang berideologikan agama maupun nasionalis.

Lahirnya partai-partai politik baru tidak terlepas dari pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999, dimana merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan setelah reformasi. Peserta pemilu pada tahun 1999 jauh berbeda dengan pemilu pada masa orde baru, dimana pada masa orde baru hanya diikuti oleh dua partai politik (PDI dan PPP) serta satu Golongan Karya (Golkar) dan pada pelaksanaan pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, baik partai politik lama maupun baru. Sebagai negara demokratis, kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan, dimana kehadirannya diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat, penyeimbang kekuatan politik serta sebagai sarana pengkritik dan kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa. Namun, dengan banyaknya partai politik tidak jarang terjadi benturan-benturan

kepentingan politik antar partai. Sehingga kecenderungan partai politik lebih fokus mengurus kepentingan partainya saja dan melupakan fungsi pokoknya sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Sikap dan perilaku partai politik yang dianggap sudah menyeleweng, diperparah oleh sikap dan perilaku banyak anggotanya, dimana anggota partai politik yang duduk dalam pemerintah dan DPR bukan berfungsi sebagai wakil rakyat melainkan hanya sebagai wakil partai politik. Para kaum elit politik yang hanya mengejar kepentingannya dengan membentuk partai politik tanpa menghiraukan apakah partai politik itu memperjuangkan platform tertentu, hal tersebut mengakibatkan jumlah partai politik yang tidak terkendali tanpa ada identitas politik tertentu bagi masing-masing partai politik. Keadaan demikian menimbulkan kehidupan politik yang jauh dari mendukung terwujudnya kesejahteraan bangsa. Sikap serta perilaku ini menimbulkan kekecewaan bagi rakyat, sehingga terjadi krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan dan kepemimpinan setiap saat dapat melahirkan ketidakpercayaan politik (*political distrust*), sehingga dimungkinkan terjadi delegitimasi kekuasaan oleh rakyat.

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik bagi warga negara. Pendidikan politik diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang persoalan politik tetapi juga bagi para pemilih yang sudah memiliki pengetahuan tentang persoalan politik. Hal

demikian dikarenakan sikap apatis terhadap kegiatan politik dimungkinkan muncul dari kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan politik, dikarenakan adanya kekecewaan serta frustrasi terhadap sistem politik yang ada, sehingga memunculkan kalangan masyarakat yang apatis dan bahkan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan menjadi golput (golongan putih).

Hal ini menjadikan pentingnya pendidikan politik (*political education*) bagi rakyat. Dengan kata lain pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong warga Negara (pemilih) untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai. Edgar yang dikutip Prihatmoko, (2003: 74) mendefinisikan pendidikan politik sebagai penyiapan generasi untuk berfikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan mendidik karakter manusia non formal oleh partai politik, media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting, karena dalam melangsungkan pembangunan sebuah bangsa memerlukan syarat untuk keterdidikan rakyat secara politik. Rakyat yang terdidik secara politik adalah warga negara, sehingga ia bisa secara sadar mandiri ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan. Kehadiran partai politik dapat dilihat pada perannya dalam melakukan pendidikan politik kepada warga masyarakat. Dengan pendidikan politik masyarakat dimungkinkan untuk memiliki kebudayaan politik yang ideal,

yakni kesadaran untuk mendukung sistem politik dan sekaligus mampu memberikan kritik dan koreksi.

Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, khususnya diarahkan kepada upaya membina kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai pribadi otonom bebas dan pada sosialisasinya, dalam kaitannya dengan statusnya sebagai masyarakat sosial selaku warga negara. Pendidikan politik berusaha membawa individu kepada konsistensi diri yang mandiri untuk menuju arah yang lebih baik dan tidak bersikap apatis untuk dijadikan mekanisme yang kuat untuk menentukan sikap-sikap politik, memilih alternatif politik paling relevan, kemudian melakukan berbagai langkah-langkah yang lebih tepat.

Pendidikan politik diarahkan pada pembentukan pribadi manusia sebagai partisipasi politik yang baik dan aktif, persyaratannya antara lain menurut Kartono (2009 :27) adalah sebagai berikut:

1. Individu tersebut harus memiliki cukup informasi politik agar mempunyai wawasan sehat terhadap peristiwa-peristiwa politik dan masyarakat.
2. Mampu bersikap dan mampu menentukan sikap-sikap politik, dan mempersiapkan diri sebagai pelaku politik yang baik.
3. Melakukan banyak kebijakan politik untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pangandaran pada tanggal 10 September 2018 menyatakan bahwa “Kondisi masyarakat, khususnya Kabupaten Pangandaran pada saat ini masih dirasa

kurang akan wawasan tentang pendidikan politik, maka dari itu PDIP sebagai salah satu partai mayoritas di daerah tersebut dan sering bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil melakukan banyak sekali arahan-arahan khususnya kepada kader dan masyarakat untuk merangsang partisipasi politik secara aktif dari rakyat dalam usaha pembangunan.”

Alasan diperlukannya pendidikan politik, didasarkan pada beberapa poin menurut menurut Kartono (2009 :28) antara lain:

1. Menjadikan masyarakat sadar politik.
2. Lebih aktif dalam partisipasi politik di era pembangunan.
3. Sekaligus menghumanisasikan masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih nyaman dan sejahtera untuk dihuni oleh semua warga Indonesia.

Poin-poin di atas, merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Partai politik, mengingat masih banyaknya kader dan masyarakat yang minim akan pengetahuan tentang politik. Partai politik memiliki tugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dimana Partai politik tidak hanya memberikan perhatian kepada masyarakat saat masa kampanye lalu kemudian dilupakan, dibubarkan tanpa adanya evaluasi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ada di Kabupaten Pangandaran sudah sangat di kenal dan merupakan salah satu basis pendukung partai tersebut, maka PDIP mudah untuk masuk dan di terima oleh masyarakat khususnya Masyarakat Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian PDIP sangat mudah untuk melakukan pendidikan politik yang akan mereka terapkan kepada masyarakat. Dengan mengadakan beberapa kegiatan seperti latihan

kepemimpinan, dialog publik, debat terbuka, kampanye dialogis, menyambangi rumah tokoh-tokoh agama maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Pangandaran, khususnya yang berhubungan dengan fungsi partai politik sebagai media pendidikan politik bagi kader dan masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mencoba mengemukakan rumusan masalah adalah bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjalankan fungsinya sebagai media pendidikan politik di Kabupaten Pangandaran?

## **1.3 Batasan Penelitian**

Penelitian ini akan dibatasi dalam ruang lingkup fungsi partai politik dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai media pendidikan politik di Kabupaten Pangandaran.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menjalankan fungsinya sebagai media pendidikan politik di Kabupaten Pangandaran.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Secara Teoritis**

Adapun nilai kegunaan yang diharapkan secara teoritis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan bagi pihak yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai peran partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Sedangkan kegunaan secara praktis yang diharapkan dan penelitian adalah:

#### **1. Bagi Partai Politik**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemampuan partai dalam melakukan pendidikan politik bagi pengurus, kader, simpatisan maupun masyarakat umum

#### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat akan memiliki pengetahuan mengenai sistem politik yang ada, sehingga dengan pengetahuan politik tersebut masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang pada muaranya masyarakat akan lebih aktif dalam kegiatan politik seperti mengikuti pemilu, dan masuk partai politik.

#### **3. Bagi Peneliti**

Peneliti mendapatkan pengalaman langsung mengenai peran partai politik sebagai pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukannya.